

# STRUKTUR POLITIK KEKERASAN NEGARA

Oleh: Robertus Robet

## Pengantar

Tragedi kematian Cece, misteri kematian wartawan Bernas yang kemudian diikuti kontroversi penahanan Iwi (yang dituduhkan sebagai pelaku pembunuhan), mengangkat kembali persoalan politik kekerasan ke keprihatinan masyarakat luas. Persoalan ini menajam dan menggugah pendapat banyak kalangan terutama ketika beberapa media mengungkap indikasi keterlibatan aparat negara dalam tragedi tersebut.

Dari berbagai tanggapan yang ada, persoalan pelanggaran prosedur hukum serta profesionalisme aparat adalah hal yang paling banyak disorot. Secara normatif hal-hal tersebut memang bisa diajak untuk bertanggung jawab, namun demikian mengingat kekerasan semacam itu telah kerap kali terjadi (misalnya dengan kematian Marsinah) maka agaknya pelacakan persoalan harus lebih diarahkan ke tempat yang lebih dalam serta struktural yakni dalam politik kekerasan itu sendiri.

## Unsur-unsur Politik Kekerasan

Terbunuhnya Cece dan Udin berikutan berbagai skenario yang menggelapkan kebenaran memperlihatkan beberapa elemen dalam struktur politik kekerasan itu: elemen pertama adalah *positioning force*, orang dipaksa untuk hanya berada pada satu posisi saja (you take it or you die). Untuk memojokkan di satu posisi itu digunakan alat-alat paksa serta berbagai teknologi siksa.

Elemen kedua adalah pembatasan komunikasi, dalam politik kekerasan suasana yang

mau dimunculkan adalah anti-dialog (mono-dialog) di mana aparat pemerintah bertanya dan masyarakat menjawab (Persoalan benar atau salah, iya atau bukan tergantung dari kemauan si penanya). Parahnya yang terjadi kebanyakan adalah aparat pemerintah bertanya aparat itu pula yang menjawab: "Kamu membunuh Udin! Bukan pak! Jawab, kamu yang membunuh! Dalam politik kekerasan tanda tanya sekaligus juga tanda seru. Pertanyaan bisa sekaligus sebuah perintah. Elemen ini biasanya terungkap dalam kasus-kasus pembatalan BAP dalam pengadilan. Monopoli dialog ini juga yang mengakibatkan luasnya makra politik kekerasan, dia tidak hanya bekerja dan berakibat secara fisik atau menyangkut persoalan fisik belaka, namun melebar menyangkut persoalan kekerasan terhadap gagasan, berbagai pelarangan buku, pembreidelan termasuk pula dalam politik kekerasan. Pada tatanan ini pula, muncul semacam "kriminalisasi ganda" di mana untuk menutupi sebuah kekerasan dilakukan kekerasan yang lain. Dalam kasus Udin, bentuk ini nampak misalnya dengan cara-cara aparat "menjebak" Iwi untuk dijadikan sebagai tersangka. Hal yang sama terjadi pula kepada Cece, saksi yang seharusnya dilindungi oleh aparat, malah mati menggenaskan di tangan aparat, *Justice System* berubah menjadi *in-justice System*.

Kemudian yang ketiga, politik kekerasan senantiasa bertendensi untuk menghasilkan semacam kerusakan sistematis terhadap tubuh, dengan berbagai teknologi kekerasan (baca totalitarian tools) ia memasukkan pengalaman

tentang siksa dan sakit, tujuannya bukan sekedar untuk memperoleh pengakuan-pengakuan (confession) lebih dari itu ia juga mau mereproduksi semacam "pertobatan" atau "rasa jera", dengan begitu bisa dihasilkan suatu kepatuhan. Lebih berbahaya lagi adalah segala bentuk kekerasan itu dijalankan dalam suatu arena tertutup, segala proses yang terjadi sama sekali di luar jangkauan publik, bahkan keluarga dan kerabat si korban, tiba-tiba saja tubuh dikembalikan tapi sudah tanpa kehidupan. Ketertutupan inilah yang menghasilkan konspirasi kekerasan menjadi aman dijalankan.

Karenanya -ini yang keempat- politik kekerasan juga sebenarnya bekerja dengan memasuki wilayah mental masyarakat, berdiam di situ dan bekerja menciptakan semacam ketakutan, teror, sekaligus kemudian kesukarelaan. Masuk dalam wilayah ini, ia mereproduksi tipe masyarakat yang sangat reseptif: tumpul dan mandul secara politis.

Kelima, reproduksi politik kekerasan dilakukan pertama-tama lewat kekerasan itu sendiri. Jadi dengan mengulang serta mempraktekkan kekerasan secara terus menerus, ia makin memantapkan dirinya sebagai prosedur yang makin resmi dan sah, apalagi kemudian dalam konteks tertentu, ada semacam suntikan legitimasi misalnya tentang "subversif" dan "bukan subversif", kalau seorang anggota masyarakat bersangkutan telah dicap sebagai "berpikiran seperti subversif" maka seolah-olah telah menjadi sah dan halal kekerasan dilakukan kepadanya. Jadi begitu pemancangan sebuah simbolisasi politik (misalnya dicap subversif) dilakukan, politik kekerasan ikut memapankan dirinya sekaligus.

Dengan begitu -keenam- politik kekerasan juga menyangkut keberthanan sebuah altar sakralisasi kekuasaan, tempat di mana seluruh sistem ideologi, pemikiran, dipusatkan, diseleksi dan diajarkan. Politik kekerasan adalah pengawal setia wilayah ini.

Ketujuh, dalam menjalankan operasinya, politik kekerasan melibatkan berbagai aparat resmi maupun tidak resmi: bisa instansi kekuasaan langsung seperti polisi tentara, hansip, satpam "bisa pula dilakukan segerombolan "pihak swasta", preman dan sebagainya.

Dan delapan, politik kekerasan senantiasa berkaitan dengan komoditi kekerasan: alat-alat siksa dari yang paling kuno sampai yang termodern. Dari cambuk sampai setrum listrik. Untuk negara di mana institusi kekerasan yang ada hidup pas-pasan dari berbagai pungutan dan kolusi, kemampuan untuk mengakses ke komoditi kekerasan yang canggih dan "lebih beradab" tersendat-sendat. Karenanya aparat di sini lebih "suka" menggunakan "air kencingnya", menyuruh menjilati lantai (lihat penuturan bos PT CPS), pentungan, kabel listrik dan sebagainya.

### Struktur Politik Kekerasan

Pada dasarnya politik kekerasan lebih merupakan ekspresi dari melebarnya kekuasaan yang telah begitu mapan, sehingga dengan telanjang dan terbuka dia bebas dioperasikan (orang diambil dan disiksa di depan keluarganya, skenario yang kelihatan kebohongannya, rekonstruksi yang nyata dibuat-buat dan sebagainya). Dengan begitu politik kekerasan juga bisa merupakan kekerasan dalam politik.

Hal ini semakin nampak apabila kita memperhatikan realitas bahwa pada dasarnya politik kekerasan bersifat lintas kelas. Artinya dia bisa mengambil korban siapa saja lepas dari posisi kelas korban yang bersangkutan. Golongan miskin memang paling rentan menjadi korban kekerasan (diusir dari rumah, digusur, dipukul di jalan-jalan), tapi seorang pemilik modal seperti Judi Susanto pun tidak bisa luput dari kekerasan aparat.

Kemudian yang juga penting untuk dilihat adalah bahwa sebenarnya politik kekerasan merefleksikan secara mendalam relasi civil society terhadap negara di Indonesia, mengingat pelaku senantiasa aparat negara sementara korban biasanya adalah warga negara biasa. Artinya mereka yang menggunakan atribut negara memiliki kekuatan yang seakan-akan tanpa batas sehingga bisa bertindak di luar UU (yang dibuat negara sendiri). Lebih dalam lagi, dengan begitu politik kekerasan bukan merupakan persoalan per-oknum-an melainkan lebih kepada persoalan struktural yang menyangkut watak negara yang keras berhadapan dengan masyarakat yang lemah. Kita diperlihatkan bahwa pada dasarnya

politik kekerasan itu memiliki akar-akarnya dalam tubuh negara sendiri, bukan semata-mata persoalan aparat. Karenanya menjadi signifikan untuk mengatakannya sebagai problem civil society di Indonesia. Dengan begitu yang menjadi agenda luasnya adalah bagaimana mengusahakan sebuah masyarakat yang makin kuat, makin punya kontrol terhadap kekuasaan.

### Beberapa Kemungkinan

Dengan peta dan paparan posisi di atas maka yang menjadi urusan paling mendesak adalah bagaimana mensupport kekuatan kepada masyarakat (baca: korban) semacam imunitas atau kekebalan terhadap kekerasan dan kecenderungan kekerasan yang dilakukan negara untuk urusan itu beberapa hal patut kita ajukan.

Pertama, menyangkut persoalan instrumen institusional politik kekerasan: karena kekerasan itu pada dasarnya dilakukan secara institusional (baik disadari ataupun tidak oleh pelakunya); di dalam penjara (institusi yang dibangun pemerintah), oleh polisi (ataupun mereka yang karena mengidentikkan diri dengan aparat seperti hansip, satpam, tibum dan sebagainya) memiliki kekuatan dan wewenang untuk menangkap bahkan mengadili dengan siksaan warga negara lainnya. Menjadi sangat penting untuk memeriksa kembali berbagai instrumen yang bertautan dengan politik kekerasan dalam hal ini kita bisa merinci tiga instrumen yakni:

1. Instrumen Represif Formal kekerasan: Angkatan Bersenjata (Tentara dan Polisi).
2. Instrumen Ideologis kekerasan: berbagai perundangan seperti Hartzal, Artikelen, RUU Subversiv, KUHAP yang tidak sempurna, aturan penjara, sistem intel.
3. Instrumen Represif Kekerasan Non Formal: Satpam, Tibum, Hansip, Preman.

Di sini sangat penting misalnya untuk memeriksa relasi polisi dan militer dalam angkatan bersenjata. Secara kultural sebenar-

nya fungsi polisi sangat berbeda dengan militer, sementara secara organisatoris keduanya didempatkan, akibatnya kultur kekerasan dengan mudah merekat dalam diri polisi. Sukar dibedakan mana polisi mana militer, karena kedua-duanya nyaris memiliki watak yang sama. Di sini menjadi penting untuk memikirkan pertama bagaimana membentuk institusi yang mampu mentransformir watak polisi yang bebas represi sekaligus mengasingkan campur tangan militer dalam urusan kepolisian, kedua diperlukan suatu usaha untuk merevisi KUHAP; melucuti berbagai instrumen perundangan lain yang bertendensi menyediakan basis hukum/ideologis baru bagi berlangsungnya politik kekerasan.

Kedua, menyangkut penguatan masyarakat. Kita ibaratkan bahwa negara itu seperti penyakit AIDS, bekerja dengan terus-menerus melemahkan kekuatan dan kekebalan masyarakat. Politik kekerasan mengambil tempat sebagai virus HIV yang secara langsung beroperasi ke sel-sel dan bagian-bagian yang terkecil, merongrong kesehatan, menggerogoti kemampuan-kemampuan masyarakat untuk kemudian mematikannya perlahan-lahan. Politik kekerasan memberikan rasa takut, jera dan teror, dengan begitu ia bisa diproduksi terus menerus dengan kekuatan yang makin dahsyat. Karenanya pada titik ini untuk menghentikan politik kekerasan, diperlukan semacam serum yang memperkuat masyarakat, memberinya kekuatan untuk bertahan dan melawan. Di sini penting untuk dimulainya suatu prakarsa pertama-tama untuk menunjukkan kepada institusi kekuasaan bahwa ia tidak bisa lagi sewenang-wenang, kedua untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada hukum, diperlukan keberanian untuk memulai mengambil sikap resmi terhadap politik kekerasan. Menuntut aparat/institusi yang melakukan kekerasan.

Robertus Robert adalah Asisten Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP-Universitas Indonesia dan Ka. Lit Bang YLBHI.